



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	43
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	50
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025	55
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	68
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 69	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	69
3.3 Program dan Kegiatan	85
BAB V PENUTUP	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Tahun 2024
Tabel 2.3	Capaian Indicator Kinerja Kunci KeluaranDinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.4	Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan I tahun 2025
Tabel. 2.5	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.6	Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku kepentingan Tahun 2025
Tabel 3.1	Rekap Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Melalui Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perencanaan diatasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait hal tersebut, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu merancang pelaksanaan tugas-tugasnya agar lebih jelas dan terukur. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai wujud penjabaran / pelaksanaan dari RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan digunakan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya program kerja yang selaras, serta didukung oleh kesamaan referensi dan persepsi dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , maka diharapkan ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi pengembangan rencana kerja operasional dari seluruh komponen penyelenggara fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan pembangunan politik.

Sehingga nantinya dapat diterima sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemerintah.

Panjang.Padang Panjang, 30 Juni 2025
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. OSMAN BIN NUR, M,Si
Penata Muda Utama NIP 196901201989021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga apemerintah di daerah, maka dalam system perencanaan pembangunan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Permendagri No. 77 T ahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka diamanatkan bagi daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan Bupati/Walikota mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disampaikan/disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Walikota serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Perubahan RKPD dan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berkennaan dengan amanat tersebut Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan nasional maupun provinsi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksnaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Melalui Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perencanaan diatasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 ini didasarkan antara lain kepada :

- a. Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW);
- d. Undang Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- i. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

- j. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- k. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- n. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- o. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 - u. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 umumnya mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045
 - v. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ;
 - w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
 - x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Perubahan Kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.
2. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program kegiatan agar selaras dengan program tahunan daerah
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis lainnya seperti penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran sub kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan sistematika berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUGAN ANAK

- 2.1 Evaluasi Perubahan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD tahun 2025
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUGAN ANAK
- 3.1 Telahan terhadap kebijakan Nasional/
 - 3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta narasinya
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 pada Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai Triwulan I tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja sampai Triwulan I tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Tahun 2025 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksankan.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) urusan Wajib yang terdiri dari Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan struktur organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari empat bidang dan satu secretariat..

Rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai triwulan I Tahun 2025 adalah 26 % dengan target 17 % Namun masih terdapat beberapa subkegiatan dengan realisasi keuangan dibawah dibawah target. Realisasi pelaksanaan rencana kerja per urusan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPIAAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPIAAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KE T
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4				6	7	8	9	14		11		12		13		14	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	15.901.884.786	100 %	6.707.350.978	100		100	5.204.350.724				100	5.204.350.724	100	33	100 %	5.142.969.762	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	12.167.792.646	100 %	5.486.289.035	100		100	-				100	-	100	-	100 %	4.055.930.882	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	1554 Orang/bulan	12.167.792.646	560 Orang/bulan	5.486.289.035	144	1.489.412.197	144	1.229.496.302				144	1.229.496.302	144	10	518 Orang/bulan	4.055.930.882	
	Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaiian perangkat daerah	100 %	36.500.000	100 %	17.850.000	100		100	-				100	-	100	-	0 %	-	
	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	36.500.000	40	17.850.000	0	-	0	-				-	-	-	-	0 Paket	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	898.224.100	100 %	290.706.177	100		100	898.224.100				100	898.224.100	100	100	100 %	333.916.200	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T				
							I		II		III		IV											
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	16.175.100	4 Jenis	5.354.000	4	1.000.000	4	255.000							4	255.000	4	2	5 Jenis	5.391.700	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	195.000.000	4 Paket	42.705.250	4	29.000.000	4	4.572.000							4	4.572.000	4	2	7 Paket	65.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	58.999.000	12 Paket	7.951.100	1	7.000.000	1	2.969.800							1	2.969.800	1	5	4 Paket	24.499.500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	616.050.000	24 Laporan	234.695.827	3	98.250.000	3	47.396.392							3	47.396.392	3	8	24 Laporan	233.025.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	2 Dokumen	12.000.000	-	67.046.000	0		0	-							-	-	-	-	1 Dokumen	6.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	600.000.000	100 %	67.046.000	100		100	600.000.000							100	600.000.000	100	100	100 %	20.000.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	0 Unit	100.000.000	13 Unit	67.046.000	13	18.549.000	13	-							13	-	13	-	5 Unit	20.000.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit					-							-	-	-	-	0 Unit	-	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	500.000.000	-					-							-	-	-	-	0 Unit	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0 Unit	-	0 Unit					-							-	-	-	-	1 Unit	-	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T			
							I		II		III		IV										
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14	
		Lainnya yang Disediakan																					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.566.545.040	100 persen	674.145.930	100		100	1.566.545.040						100	1.566.545.040	100	100	100 %	522.181.680	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	161.681.040	36 Laporan	30.612.930	3	11.400.000	3	7.723.901						3	7.723.901	3	5	3 Lapa ron	53.893.680	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.404.864.000	12 Laporan	643.533.000	3	196.450.000	3	184.132.000						3	184.132.000	3	13	4 Lapa ron	468.288.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	632.823.000	100 %	171.313.836	100		100	632.823.000						100	632.823.000	100	100	100 %	210.941.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63 Unit	334.575.000	21 Unit	109.757.436	21	34.065.600	21	20.105.689						21	20.105.689	21	6	21 Unit	111.525.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	106.548.000	27 Unit	33.299.400	27	51.400.000	27	5.727.500						27	5.727.500	27	5	27 Unit	35.516.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	165 Unit	71.700.000	55 Unit	8.790.000	55	6.000.000	55	4.030.000						55	4.030.000	55	6	55 Unit	23.900.000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	18 Unit	120.000.000	6 unit	19.467.000	6	20.142.000	6	350.000						6	350.000	6	0	6 Unit	40.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T			
							I		II		III		IV									
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14		
		Dipelihara/Direhabil itas																				
Meningkatk an cakupan PPKS yang mendapatk an pelayanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85 %	3.609.039.100	75 Persen	1.363.089.575	75		75	110.686.453						75	110.686.453	75	3	80 %	1.269.679.700	
		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	444 Lembaga	3.609.039.100	60 Lembaga	1.363.089.575	60		60	-					60	-	60	-	148 Lemba ga	1.269.679.700	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	276 Orang	801.668.400	92 Orang	279.579.650	92	61.241.300	92	47.520.000					92	47.520.000	92	6	92 Orang	267.222.800	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	25.920.000	2 Orang	4.800.000	2	1.600.000	2	-					2	-	2	-	2 Orang	8.640.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Lembaga	2.500.000.000	60 Lembaga	981.356.148	60	127.896.000	60	45.666.453					60	45.666.453	60	2	60 Lemba ga	900.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengstuan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	15 Sertifikat	281.450.700	2 Sertifikat	97.353.777	2	29.808.300	2	17.500.000					2	17.500.000	2	6	5 Sertifik at	93.816.900	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T		
							I		II		III		IV									
1	2	3	4				6		7		8		9		14		11		12		13	14
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)																			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Tertangani	90 %	2.620.675.456	90 %	800.960.807	90		90	297.553.126					90	297.553.126	90	11	90 %	873.711.400	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2250 Orang	1.499.541.256	500	492.033.690				-					-	-	-	-	750 Orang	500.000.000	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1377 Orang	600.000.000	285	144.729.544	210	199.930.450	210	121.847.626					210	121.847.626	210	20	459 Orang	200.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	225 Orang	450.000.000	499	216.659.600	210	145.680.000	210	84.646.500					210	84.646.500	210	19	75 Orang	150.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	66 Orang	240.000.000	15	62.906.500	9	12.882.000	9	22.590.750					9	22.590.750	9	9	22 Orang	80.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T				
							I		II		III		IV											
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
		Kabupaten/Kota (Orang)																						
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	149.541.256	50 Orang	25.683.796	7	19.206.666	7	2.159.500							7	2.159.500	7	1	50 Orang	50.000.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geladangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geladangan Pengemis dan Masyarakat Kewena ngan Kabupaten/Kota (Orang)	150 Orang	60.000.000	50 Orang	42.054.250	63	11.000.000	63	5.475.000							63	5.475.000	63	9	50 Orang	20.000.000	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2792 Orang	1.121.134.200	100	308.927.117	100		100	-							100	-	100	-	2710 Orang	373.711.400	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	225.000.000	400	26.213.713	25	11.600.000	25	13.493.750							25	13.493.750	25	6	75 Orang	75.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun	225 Orang	225.000.000	400	49.342.179	19	6.260.000	19	12.320.000							19	12.320.000	19	5	75 Orang	75.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		
							I		II		III		IV							
1	2	3	4			6	7	8	9	14	11	12	13	14					KE T	
		Kewenangan Kabupaten/Kota																		
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	30.000.000	5	7.847.000	4	6.170.000	4	5.700.000					4	5.700.000	4	19	5 Orang 10.000.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	360.000.000	25	134.072.525	150	6.850.000	150	6.590.000					150	6.590.000	150	2	30 Orang 120.000.000
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	281.134.200	2	91.451.700	0	20.569.870	0	22.730.000					-	22.730.000	-	8	10 Dokum en 93.711.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	684.088.800	86,98 Persen	463.563.903				16.789.000					-	16.789.000	-	2	87,97 % 228.029.600
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	42 Layanan	684.088.800	8 layanan	463.563.903				-					-	-	-	-	17 Layana n 228.029.600
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	6357 Orang	237.960.000	1749 orang	79.548.600		40.435.600		3.037.000					-	3.037.000	-	1	2119 Orang 79.320.000
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	3605 Keluarga	401.128.800	1142 Keluarga	384.015.303	114 2	16.264.600	114 2	13.752.000					114 2	13.752.000	1.14 2	3	1271 Keluarg a 133.709.600

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T					
							I		II		III		IV												
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	KE T
		Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																							
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	390 Orang	45.000.000	0 Orang	-	0	-	0	-							-	-	-	-	130 Orang	15.000.000		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	460.509.957	100 %	165.138.000				10.566.250						-	10.566.250	-	2	100 %	153.503.319			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 %	240.000.000	100 %	165.138.000										-	-	-	-	100 %	80.000.000			
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	900 Orang	90.000.000	500	15.218.950	0	-	0	-						-	-	-	-	300 Orang	30.000.000			
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	900 Orang	90.000.000	200	6.096.000	0	10.000.000	0	6.400.000						-	6.400.000	-	7	300 Orang	30.000.000			
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang	900 Orang	60.000.000	150	4.468.000	0	-	0	-						-	-	-	-	300 Orang	20.000.000			

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T			
							I		II		III		IV										
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																				
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiasagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	90 Orang	220.509.957	30 Orang	139.355.050			-						-	-	-	-	30 Orang	73.503.319		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90 Orang	220.509.957	30 Orang	139.355.050	30	22.218.000	30	4.166.250					30	4.166.250	30	2	30 Orang	73.503.319		
			Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	1 Unit		1 Unit	-			-						-	-	-	-	0 Unit			
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	75.000.000	100 %	24.542.000			-						-	-	-	-	100 %	25.000.000		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam yang dipelihara	294 Makam	75.000.000	98 Makam	24.542.000			-						-	-	-	-	98 Makam	25.000.000		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	294 Makam	75.000.000	98 Makam	24.542.000	98	508.600	98	-					98	-	98	-	98 Makam	25.000.000		
	Meningkatkan					-	-			-						-	-	-	-		219.580.000		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T				
							I		II		III		IV											
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
	pembangunan perempuan dan anak	PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	648.740.000	100 Persen	161.100.162				11.297.850					-	11.297.850	-	2	100 Persen	40.000.000			
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen		20 Persen	-				-					-	-	-	-		20 Persen			
		Pelembagaan pengarutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilih	69 OPD	110.000.000	23 OPD	53.069.251				-					-	-	-	-	23 OPD	40.000.000			
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	69 OPD		23 OPD	-				-					-	-	-	-	23 OPD	30.000.000			
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Perangkat daerah	110.000.000	23 Perangkat Daerah	53.069.251	23	26.861.400	23	9.795.350					23	9.795.350	23	9	23 Perangkat Daerah	30.000.000			
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Persentase perempuan partai politik yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan	50 %	90.000.000	50 %	6.759.200	50			-					-	-	-	-	50 %	149.580.000			

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			
							I		II		III		IV								
1	2	3	4			6	7	8	9	14	11	12	13	14						KE T	
		ekonomi kewenangan kabupaten/kota			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	78 Lembaga	90.000.000	26 Lembaga	6.759.200	26	1.271.150	-	-	-	-	-	-	-	-	26 Lema ga			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 persen	448.740.000	100 Persen	101.271.711			-	-	-	-	-	-	-	-	100 persen	149.580.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	12 Lembaga	-	15 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Lema ga	149.532.000		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	45 Dokume n	448.740.000	15	101.271.711	3	19.400.000	3	1.502.500					3	1.502.500	3	0	15 Dokum en	30.000.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T					
							I		II		III		IV											
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	463.566.000	1	262.779.926				18.172.500						-	18.172.500	-	4	100 BTJ	30.000.000		
		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	24 Lembaga	100.000.000	8 Lembaga	60.142.125				-						-	-	-	-	8 Lemba ga	104.502.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokume n	100.000.000	6 Dokumen	60.142.125	1	5.071.200		-						-	-	-	-	6 Dokum en	104.502.000		
		Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 %	313.506.000	100 Persen	83.717.801				-						-	-	-	-	100 %	15.030.000		
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	34 layanan	313.506.000	10 Layanan	83.717.801	12	34.993.750	12	18.172.500						12	18.172.500	12	6	12 layana n	15.030.000		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T				
							I		II		III		IV											
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
		kewenangan kabupaten/kota																						
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	30 Layanan	50.060.000	10 Layanan	118.920.000				-							-	-	-	-	10 Layana n	120.620.000	
		Meningkatkan pemenuhan hak anak	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	45 Dokumen	50.060.000	15 Dokumen	83.791.500			-							-	-	-	-	15 Dokum en	43.855.000	
		PROGRAM PEMENUNAH HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 %	353.005.000	80 Persen	141.884.885				36.539.000							-	36.539.000	-	10	83 %	43.855.000	
		Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	105 Lembaga	122.710.000	30 Lembaga	49.428.250				-							-	-	-	-	35 Lemb aga		
		Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	45 Dokumen	122.710.000	15 Dokumen	49.428.250	1	737.700		-						-	-	-	-	15 Dokum en	76.765.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	90 Organisa si	-	30 Organisasi	-			-							-	-	-	-	30 Organi sasi			

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			
							I		II		III		IV								
1	2	3	4			6	7	8	9	14	11	12	13	14							
		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		penguanan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase forum anak aktif	80 persen	230.295.000	50 Persen	92.456.635			-					-	-	-	-	70%		
			Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen		100 Persen			-						-	-	-	100 Persen	76.765.000		
			Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen		100 Persen			-						-	-	-	100 Persen			
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	105 Orang	230.295.000	35 Orang	92.456.635			-					-	-	-	35 Orang	262.137.000		
		Penguanan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguanan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1	37.182.100	1	36.539.000					1	36.539.000	1	1 Dokumen	62.137.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan	100 BTJ	823.836.000	1	257.745.387				21.852.570					-	21.852.570	-	3	100 BTJ	22.137.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T				
							I		II		III		IV											
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
		pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu																						
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	30 Lembaga	186.411.000	100 persen	117.395.340				-						-	-	-	-	30 Lembaga	40.000.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kgiatan pencegahan KTA	10 Orang	66.411.000	10 Orang	87.593.790	5	16.391.600	4.843.320						-	4.843.320	-	7	10 Orang	160.000.000			
		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	4 Dokumen	120.000.000	-	29.801.550	1	6.862.500	1	1.532.000					1	1.532.000	1	1	6 Dokumen	40.000.000			
		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 %	472.425.000	100 %	98.449.300				-					-	-	-	-	100 %	120.000.000			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	34 Orang	107.125.000	10 Orang	26.256.000	12	12.390.000	10	-					10	-	10	-	12 Orang	40.000.000			
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	34 Orang	365.300.000	12 Orang	72.193.300		46.278.250		15.477.250					-	15.477.250	-	4	12 Orang	40.000.000			

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T		
							I		II		III		IV								
1	2	3	4			6	7	8	9	14	11	12	13	14							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas	24 Lembaga	165.000.000	8 Lembaga	41.900.747								-	-	-	8 Lembaga	78.000.000		
		Peningkalan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	165.000.000	10 Orang	41.900.747	5	5	-						5	-	5	10 Orang	28.000.000	
		Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana				-	-								-	-	-		23.000.000		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	387.100.000	100 %	86.664.235			3.193.500					-	3.193.500	-	1	100 %	5.000.000	
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	111.000.000	1 Dokumen	15.279.950								-	-	-	1 Dokumen	50.000.000		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		
							I		II		III		IV								KET
1	2	3	4			6	7	8	9	14	11	12	13	14							
		Implementasi Pendidikan Kependidikan jalur pendidikan formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	75 Kegiatan	66.000.000	1 kegiatan K Rp.	15.279.950 1	-	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	25 Kegiatan K Rp.	-	
		Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	40 Organisa si	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Organi sasi K Rp.	30.000.000	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	60 Satuan Pendidik an	45.000.000	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dokum en K Rp.	20.000.000	
		Pemetaan Perkiraa pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabupaten/kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	48 Unit	276.100.000	16 unit K Rp.	71.384.285 3	-	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	16 Unit 745.440.001 K Rp.		
		pengolahan dan pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	36 Dokumen	126.100.000	12 Dokumen K Rp.	23.925.480 3	3.859.200	3 K Rp.	3.193.500 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000 K Rp.	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KET	
							I		II		III		IV									
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Lapangan dan Pelayanan KB																				
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk	48 Unit	90.000.000	16 Unit	30.928.565	16		16	-					16	-	16	-			0
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	19.400.000	3	2.400.000	3	-					3	-	3	-	12 Lapora n	40.000.000	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	67 %	1.856.568.250	62 Persen	1.171.506.159	50			8.942.520						-	8.942.520	-	0	65 %	15.000.000
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2434 Orang	182.900.000	2287 orang	479.389.112	105 0			-					-	-	-	-	2450 Orang	167.880.000	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	17.900.000	4 Laporan	139.779.915	1	19.275.815	1	8.942.520					1	8.942.520	1	50	4 Lapora n	30.000.000	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	21 Dokumen	120.000.000	-	-		8.470.000		-					-	-	-	-	7 Dokum en	137.880.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T				
							I		II		III		IV											
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
			dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan																					
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Kelurga, Kependudukan, dan Kelurga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90 Organisa si	45.000.000	-	151.742.420	30														30 Organi sasi	56.000.000	
		Pendayaunguan Tenaga Penyuluhan KB (Petugas Lapangan KB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	297 Orang	503.640.000	-	250.449.997	99														99 Orang	56.000.000	
		Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	264 Orang	90.000.000	-	46.200.000	88	12.800.000													88 Orang	1.095.120.001	
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Kelurga, Kependudukan, dan Kelurga Berencana) di Lini Lapangan olehPKB/PLKB	40 Organisa si	413.640.000	-	204.249.997	40	37.720.000													40 Organi sasi	552.560.001	
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 persen	166.908.250	50 persen	-	50														50 %	30.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		
							I		II		III		IV							
1	2	3	4			6	7	8	9	14	11	12	13	14						KE T
		pembinaan kesertaan ber KB.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penghargaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9 Organisa si	166.908.250	-	-	15.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Organisasi	522.560.000		
Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	67 %	3.462.414.000	62 Persen	1.018.190.811			40.563.175							40.563.175	-	65 %	1	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	342 Kelompok	1.772.680.000	102 kelompok	274.456.812	114		-							-	-	114 Kelompok	-	
		Promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	9 Laporan	205.000.000	3 Laporan	122.620.812	1		-						-	-	3 Laporan	542.560.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			KE T	
							I		II		III		IV						
1	2	3	4			6	7	8	9	14	11	12	13	14					KE T
		Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPK S,PiK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS) (Orang)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PiK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	669 Kader	1.567.680.000	-	-	223	93.660.000		-				-	-	-	223 Kader	522.560.000
		Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PiK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 Laporan	-	-	-	1			-				-	-	-	4 Laporan	20.000.000
		Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PiK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PiK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Unit	151.836.000			-					-	-	-	Unit	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 %	1.689.734.000	366.428.000	743.733.999											100 %	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T					
							I		II		III		IV												
1	2	3	4				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14	
		Kesejahteraan Keluarga																							
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	69 Organisa si	1.629.734.000	23 Organisasi	492.733.999	23	101.234.400		40.563.175							-	40.563.175	-	2	23 Organ iasi			
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargabagi Mitra Kerja	1 Laporan	60.000.000	-	-		-		-						-	-	-	-	1 Lapora n				

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan: 24 % realisasi fisik : 24 %
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi keuangan: 0 % realisasi fisik : 0 %
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi keuangan: 16 % realisasi fisik : 16 %
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi keuangan: 16 % realisasi fisik : 16 %
2. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 9% realisasi fisik : 9%
3. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan realisasi keuangan: 37 % realisasi fisik : 37%
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan realisasi keuangan: 14 % realisasi fisik : 14 %
 - c.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 8 % realisasi fisik : 8%
5. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 40 % realisasi fisik : 40 %
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

7. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 13 % realisasi fisik : 13%
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0 % realisasi fisik : 0%
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 1% realisasi fisik : 1%

8. Program Perlindungan Perempuan

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 19% realisasi fisik : 19%
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

9. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 27% realisasi fisik : 27%

10. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 4 % realisasi fisik : 4%

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

11. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 4% realisasi fisik : 4%

12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan realisasi keuangan: 6% realisasi fisik : 6%
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 3% realisasi fisik : 3%
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
- e. Ber-KB dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

13. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan: 13% realisasi fisik : 13%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2024 Di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LPPD) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang dirumuskan di dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Dalam LPPD, akuntabilitas yang dijabarkan terdiri dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, capaian kinerja dari 24 indikator kinerja yang diukur, 12 indikator melebihi target yaitu, Prevalensi *Stunting*, Angka PPKS, sementara masih ada 1 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya. Indikator yang belum bisa diukur dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai ini baru dirilis dalam portal BPS Provinsi Sumatera Barat setelah Laporan Kinerja Tahun 2022 dikirimkan. Nilai IDG Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah 67,82 masih kurang 1,62 dari target dengan capaian 97,67%. Dari 24 indikator kinerja pada tahun 2022, sebanyak 11 indikator capaiannya telah melebihi target akhir RPJMD yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, capaiannya tidak hanya melebihi target yang ditetapkan tahun 2022 saja, bahkan telah melebihi target akhir RPJMD.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintahan dan Urusan

Penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap. Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (merupakan Indikator Kinerja Kunci Output yang berasal dari indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan);
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (merupakan Indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan), dan
3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Untuk melihat pencapaian dari masing-masing indikator (Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026	
1	Angka PPKS		IKK	4.68	4.49	4.30	3,69			4.49	4.30	
2	Persentase PPKS yang tertangani		IKK	80	82.5	85	97			82.5	85	
3	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif		IKK	100	100	100	100			100	100	
4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif		IKK	100	100	100	100			100	100	
5	Persentase lansia terlantar yang tertangani	SPM		100	100	100	100			100	100	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	SPM		100	100	100	100			100	100	
7	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	SPM		100	100	100	100			100	100	
8	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	SPM		100	100	100	100			100	100	
9	Persentase penurunan KK miskin		IKK									
10	Persentase korban bencana yang tertangani	SPM		100	100	100	100			100	100	
11	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara		IKK	100	100	100	100			100	100	
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		IKK	71.44	73.05	75.06	75,62			73.05	75.06	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi (Tahun)	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		IKK				98,23				
14	Predikat APE		IKK	Madya	Nindya	Nindya				Nindya	Nindya
15	Persentase ARG terhadap APBD		IKK				15.38				
16	Persentase organisasi perempuan aktif		IKK	100	100	100	100			100	100
17	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih		IKK	100	100	100	100			100	100
18	Tingkat capaian Kota Layak Anak		IKK	Utama	Utama	Utama				Utama	Utama
19	Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar		IKK	83,5	87	90	80			87	90
20	Persentase forum anak yang aktif		IKK	83,5	87	90	80			87	90
21	Persentase kasus anak korban kekerasan yang terselesaikan		IKK	100	100	100	100			100	100
22	TFR (Total Fertility Rate)		IKK	2,35	2,3	2,25	2,43			2,3	2,25
23	Rata-rata jumlah anak perkeluarga		IKK	2,35	2,3	2,25	2,43			2,3	2,25
24	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk		IKK	100	100	100	100			100	100
25	Unmeet Need		IKK	22,5	22,3	22				22,3	22
26	Prevalensi Stunting		IKK	14,00	12,60	11,20	9,49			12,60	11,20
27	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB		IKK	70,75	70,80	70,90	61			70,80	70,90
28	Persentase kelompok PIK R yang aktif		IKK	75	75	75	75			75	75

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi (Tahun)	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		
29	Persentase PUS keluarga sasaran BKB yang memperoleh pendampingan 1000 HP kelahiran		IKK	70	72.5	75	74			72.5	75
30	Persentase kelompok PIK Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu		IKK	100	100	100	90			100	100

Tabel. 2.3
Capaian Indicator Kinerja Kunci Keluaran
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	NO IKK	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
				KINERJA	
1		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	-	
2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	-	
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	-	
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	410	-	
5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	-	
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket	410	-	
1.f.1		permakanan sesuai standar gizi			
7		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	-	
8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	379	-	
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	35	-	
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	-	
11		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	-	
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	-	
13		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	-	
14		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2	-	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan	143	-	
15		bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			

NO	NO IKK	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
				KINERJA	
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	33	-	
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	-	
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	7	-	
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	5	-	
20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan Keluarga	16	-	
21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	8	-	
1		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	217	-	
2		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	60	-	
3	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	-	
4		Jumlah paket permakaman khusus bagi kelompok rentan	11	-	
5		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	18	-	
6		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	28	-	

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Di pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai implemetasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah masalah kesejahteraan sosial yang di tetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapainnya.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah di tetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial untuk Tahun 2025 tertuang dalam program Rehabilitasi Sosial meliputi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Program Penangan Bencana dengan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup Pelayanan dasar yaitu :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Pelayanan Dukungan Psikososial
 - d. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan I tahun 2025

No	Sub kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode Renstra (2026)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s.d Triwulan I 2025		Percentase Tingkat Capaian	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	750	646.099.545	499	236.719.376	66,53	36,64
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	459 Orang	459	376.199.545	210	121.847.626	45,75	32,39
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75 Orang	75	150.000.000	210	84.646.500	280,00	56,43
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22 Orang	22	55.900.000	9	22.590.750	40,91	40,41
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50	44.000.000	7	2.159.500	14,00	4,91
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50 Orang	50	20.000.000	63	5.475.000	126,00	27,38

No	Sub kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode Renstra (2026)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s.d Triwulan I 2025		Percentase Tingkat Capaian	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 %	100	26.500.000	0	6.400.000	0,00	24,15
1.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300	20.000.000	0	6.400.000	0,00	32,00
2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300	6.500.000	0	-	0,00	0,00
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	30	73.499.719	0	4.166.250	0,00	5,67
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30 Orang	30	73.499.719	0	4.166.250	0,00	5,67

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program sosial, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa isu penting yang perlu diperhatikan adalah :

1. Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender

Upaya pembangunan dan pengarusutamaan gender (PUG) masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan, perencanaan, maupun implementasi di lapangan. Masih terdapat kesenjangan akses dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan capaian yang belum merata antar wilayah maupun kelompok penduduk. Kelembagaan PUG, termasuk kapasitas SDM, komitmen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelaksanaan Analisis Gender (ARG) dan Gender Budget Statement (GBS), juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan program-program pembangunan belum sepenuhnya responsif gender dan belum mampu mengatasi ketimpangan yang ada.

2. Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)

Penyelenggaraan Kota Layak Anak memerlukan keterpaduan lintas sektor dan pemenuhan hak anak dalam lima klaster, mulai dari hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Meskipun berbagai program sudah dilaksanakan, pemenuhan indikator KLA masih belum mencapai skor optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketersediaan data yang belum terintegrasi, sarana dan prasarana ramah anak yang belum merata, masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, serta belum maksimalnya peran

masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak. Selain itu, kapasitas kelembagaan UPTD PPA dan sistem rujukan kasus masih perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif.

3. Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
Pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menghadapi tantangan pada aspek akses layanan, kualitas data, dan cakupan peserta KB modern. Perubahan struktur umur penduduk, tingginya persentase usia produktif, serta masih adanya disparitas angka kelahiran menurut wilayah menunjukkan bahwa program KB belum sepenuhnya merata. Pemanfaatan data kependudukan juga belum optimal dalam perencanaan pembangunan, sementara layanan KB masih menghadapi keterbatasan fasilitas, distribusi tenaga, dan ketersediaan alat/obat kontrasepsi. Sosialisasi dan edukasi mengenai keluarga berencana, Generasi Berencana (Genre), dan pengasuhan remaja juga masih perlu diperkuat untuk mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan, pernikahan usia anak, serta persoalan kesehatan reproduksi remaja.
4. Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting

Upaya percepatan penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas OPD, namun implementasi di tingkat lapangan masih belum konsisten. Identifikasi keluarga risiko stunting, pendampingan oleh TPPS, intervensi spesifik dan sensitif, serta pelaporan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian keluarga masih kesulitan mengakses layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, pendidikan pengasuhan, serta layanan KB pascapersalinan. Selain itu, pemanfaatan data keluarga risiko stunting melalui SIGA, atau aplikasi pendukung lainnya belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan dan pemantauan. Kondisi ini menyebabkan penanganan tidak selalu tepat sasaran dan capaian prevalensi stunting bergerak lambat menuju target.

5. Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS
Cakupan dan kualitas layanan sosial bagi PPKS seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, fakir miskin,

dan kelompok rentan lainnya masih belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan data PPKS yang mutakhir dan terintegrasi, minimnya jejaring layanan dengan lembaga non-pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia pekerja sosial, TKSK, dan relawan lainnya. Sarana layanan seperti rumah singgah, balai rehabilitasi, dan layanan berbasis komunitas masih belum memadai, sehingga tidak seluruh PPKS mendapatkan layanan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan penanganan masalah sosial tidak selalu efektif, dan risiko kerentanan sosial tetap tinggi di Masyarakat

Permasalahan belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal menitik beratkan pada peningkatan pelayanan sosial yang difokuskan pada 6 kelompok sasaran permasalahan yaitu kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan, korban bencana, tuna sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan sosial belum menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. (PPKS)	Bagaimana meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, disabilitas, dan anak terlantar?	Data PPKS belum mutakhir dan belum terintegrasi
2	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana	Mengapa partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program KB masih rendah, terutama di wilayah pinggiran?	Masih adanya stigma terhadap KB
3	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bagaimana meningkatkan efektivitas perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak?	Sarana dan prasarana Kelembagaan UPTD PPA masih kurang
4	Rendahnya partisipasi perempuan dalam	Mengapa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan	Masih ada ketimpangan gender

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	pembangunan dan ekonomi produktif	pengambilan keputusan publik masih rendah?	dalam akses pelatihan dan modal usaha
5	Kualitas tata kelola pelayanan publik belum optimal	Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dinsos PPKBPPPA?	- Kapasitas aparatur belum merata

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan sosial, kependudukan, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara umum, permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan sosial belum menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. (PPKS)
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ekonomi produktif
5. Kualitas tata kelola pelayanan publik belum optimal

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ialah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,

rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Reviu RKPD-P sebagai salah satu bentuk quality assurance sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan. Diharapkan dengan adanya Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah dapat meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

Reviu dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perubahan dengan informasi dalam Perubahan RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.

Reviu terhadap RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja sasaran dan program dalam RKPD telah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pencantuman indicator program kegiatan dan target dalam RKPD telah sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri teknis yang terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program pada RKPD
5. Program prioritas pembangunan pada RKPD di dasarkan pada hasil identifikasi permasalahan.
6. Program prioritas pembangunan pada RKPD di dasarkan pada isu strategis dan permasalahan.

Tabel. 2.6
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capaiin	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaiain Kinerja	Kebutuhan Dana
	INAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			*****	*****	INAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				*****
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			*****	*****	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				*****
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			*****	*****	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				*****
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipermudah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	*****	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipermudah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	*****
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	*****	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	*****
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504	4.675.865.490	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504	4.675.865.490
1.06.01.2.06.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	154.313.392	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	154.313.392
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.391.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.391.700
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.520.170	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.520.170
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.645.522	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.645.522
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94.756.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94.756.000
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	22.184.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	22.184.500
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.184.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.184.500
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	688.164.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	688.164.840
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.244.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.244.840
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	644.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	644.920.000
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 persen	251.829.950	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 persen	251.829.950
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	121.830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	121.830.000
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penitisananya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penitisananya	27 Unit	59.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penitisananya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penitisananya	27 Unit	59.200.000
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	20.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	20.800.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	49.999.950	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	49.999.950

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai Pj yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Percentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 %	#####	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Percentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 %	#####
			Percentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %				Percentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %	
1.06.02.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Percentase lembaga sosial yang aktif	100 Persen	#####	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Percentase lembaga sosial yang aktif	100 Persen	#####
1.06.02.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga	279.110.300	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga	279.110.300
1.06.02.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2.850.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2.850.000
1.06.02.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	683.206.150	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	683.206.150
1.06.02.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengualan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	90.543.600	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengualan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	90.543.600
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	#####	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	#####
			Percentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %				Percentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	
			Percentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %				Percentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	
			Percentas Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %				Percentas Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	
			Percentase Pemenui Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %				Percentase Pemenui Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	
1.06.04.02.01.	Rehabilitasi Sosial Daerah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah peserta kesejahteraan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti	750 Paket	660.942.450	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah peserta kesejahteraan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti	750 Paket	660.942.450
1.06.04.02.01.0001	Penyediaan Perlakuan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemerlukan Kebutuhan Perlakuan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	163 Orang	488.018.450	Penyediaan Perlakuan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemerlukan Kebutuhan Perlakuan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	163 Orang	488.018.450
1.06.04.02.01.0002	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaihan dan Kelingkapitan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	98.365.000	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaihan dan Kelingkapitan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	98.365.000
1.06.04.02.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35.186.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35.186.000
1.06.04.02.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.974.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.974.000
1.06.04.02.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.399.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.399.000
1.06.04.02.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKPS) yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PKPS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	354.358.134	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKPS) yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PKPS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	354.358.134
1.06.04.02.02.0003	Penyediaan Perlakuan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemerlukan Kebutuhan Perlakuan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	47.300.000	Penyediaan Perlakuan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemerlukan Kebutuhan Perlakuan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	47.300.000
1.06.04.02.02.0004	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima Pakaihan dan Kelingkapitan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	44.000.000	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima Pakaihan dan Kelingkapitan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	44.000.000
1.06.04.02.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000
1.06.04.02.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	166.756.330	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	166.756.330
1.06.04.02.02.0014	Kejamaan Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	88.801.804	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	88.801.804
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Percentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	75.977.750	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Percentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	75.977.750
			Percentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %				Percentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capaih	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Percentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	7.3 %	-			Percentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	7.3 %	-
			Percentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100 %	-			Percentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100 %	-
			Percentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergradasi dari Kemiskinan	7.3 %	-			Percentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergradasi dari Kemiskinan	7.3 %	-
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan	75.977.750	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan	75.977.750
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 Orang	12.509.900	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 Orang	12.509.900
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	63.467.850	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	63.467.850
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Percentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alami yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	90.912.037	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Percentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alami yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	90.912.037
			Percentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesadariannya	100 %	-			Percentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesadariannya	100 %	-
			Percentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemuliharaan Sosial	100 %	-			Percentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemuliharaan Sosial	100 %	-
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Percentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen	14.543.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Percentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen	14.543.000
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaihan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Massa Tanggap Darurat (Pengungsihan) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	13.100.000	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaihan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Massa Tanggap Darurat (Pengungsihan) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	13.100.000
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.443.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.443.000
1.06.06.2.02.	Penyelegaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesadariangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	76.369.037	Penyelegaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesadariangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	76.369.037
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	76.369.037	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	76.369.037
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Percentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %	114.617.500	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Percentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %	114.617.500
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	98 makam	114.617.500	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	98 makam	114.617.500
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	114.617.500	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	114.617.500
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				819.009.181	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				819.009.181
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				819.009.181	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				819.009.181
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15,4 Persen	263.935.440	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15,4 Persen	263.935.440
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66,37 Persen	-			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66,37 Persen	-
2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang memiliki data terpilih	23 OPD	33.368.100	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang memiliki data terpilih	23 OPD	33.368.100
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB	23 OPD	-			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB	23 OPD	-
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang	33.368.100	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang	33.368.100
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Percentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	0 Persen	-	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Percentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	0 Persen	-

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.08.02.2.0003	Advokasi Kekajaan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasayarakatan/ profesi dunia usaha media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0 Organisasi	-	Advokasi Kekajaan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasayarakatan/ profesi dunia usaha media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0 Organisasi	-
2.08.02.2.03.	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	26 organisasi	230.967.340	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	26 organisasi	230.967.340
			Percentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen				Percentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	230.567.340	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	230.567.340
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	147.632.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	147.632.000
2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	12 Laporan	50.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	12 Laporan	50.000.000
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	50.000.000
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	3 Lembaga	68.587.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	3 Lembaga	68.587.000
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bag Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan	68.587.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bag Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan	68.587.000
2.08.03.2.03.	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah produk hukum yang diterbitkan	1 Dokumen	29.045.000	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah produk hukum yang diterbitkan	1 Dokumen	29.045.000
			Percentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen				Percentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen	
			Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	10 layanan				Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	10 layanan	
2.08.03.2.03.0002	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 lembaga	29.045.000	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 lembaga	29.045.000
2.08.03.2.03.0004	Pengujian Jantung Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Jantung Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	Pengujian Jantung antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Jantung Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-
2.08.06.	PROGRAM PEMERUHAN HAK ANAK (PHA)		Indeks Pemeruhan Hak Anak (IPHA)	64,08 Angka	86.291.041	PROGRAM PEMERUHAN HAK ANAK (PHA)		Indeks Pemeruhan Hak Anak (IPHA)	64,08 Angka	86.291.041
2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	4 Lembaga	26.310.400	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	4 Lembaga	26.310.400
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemeruhun Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemeruhun Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	26.310.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemeruhun Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemeruhun Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	26.310.400
2.08.06.2.02.	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase forum anak aktif	70 Persen	89.980.641	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase forum anak aktif	70 Persen	89.980.641
			Percentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)					Percentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)		
			Percentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak					Percentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak		
2.08.06.2.02.0004	Pengujian Jantung antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Jantung Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	59.980.641	Pengujian Jantung antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Jantung Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	59.980.641
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Percentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	321.150.700	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Percentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	321.150.700
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	85,6 Angka				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	85,6 Angka	
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Percentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	103.224.800	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Percentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	103.224.800
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	57.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	57.000.000
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/kota	6 Dokumen	46.224.800	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/kota	6 Dokumen	46.224.800

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capai	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Percentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	177.950.900	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Percentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	177.950.900
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	7.810.900	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	7.810.900
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43 orang	170.140.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43 orang	170.140.000
2.08.07.2.03.	Pengawas dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi	10 orang	39.975.000	Pengawas dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi	10 orang	39.975.000
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota'	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan Penanganan AMPK	10 orang	39.975.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota'	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan Penanganan AMPK	10 orang	39.975.000
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			#####	#####	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			#####	#####
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	2,39 Angka	73.344.600	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	2,39 Angka	73.344.600
			Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	6,1 Angka				Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	6,1 Angka	
			Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	0,89 %				Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	0,89 %	
2.14.02.2.01.	Pemasaran dan Sinronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	7.358.800	Pemasaran dan Sinronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	7.358.800
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Keependudukan Jular Informatif di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Keependudukan Jular Informatif di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Kegiatan	-	Implementasi Pendidikan Keependudukan Jular Informatif di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Keependudukan Jular Informatif di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Kegiatan	-
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Keependudukan Jular Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Keependudukan Jular Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	7.358.800	Implementasi Pendidikan Keependudukan Jular Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Keependudukan Jular Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	7.358.800
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 Unit	65.985.800	Pemetaan Perkiraaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 Unit	65.985.800
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	19.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	19.200.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	24.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	24.000.000
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Keependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana, Kecamatan di Sektor Lain	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Keependudukan di Kampung KB yang ada Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang diberlakukan	16 Unit	22.785.800	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Keependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang diberlakukan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Keependudukan di Kampung KB yang ada Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang diberlakukan	16 Unit	22.785.800
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	62,25 %	#####	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	62,25 %	#####
			Percentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,7 %				Percentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,7 %	
			Rasio akseptor KB	74,45 %				Rasio akseptor KB	74,45 %	
			Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	66 %				Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	66 %	
			Percentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	100 %				Percentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	100 %	
2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PK) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	4734 orang	428.975.465	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PK) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	4734 orang	428.975.465
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	60.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	60.000.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	97.997.465	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	97.997.465
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasionalisasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakortek), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasionalisasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakortek), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	40.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasionalisasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakortek), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasionalisasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakortek), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	40.000.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	125.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	125.000.000

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisa Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	-	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	-
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pihak advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendukung Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	105.978.000	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pihak advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendukung Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	105.978.000
2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB, Kader MP yang dibina	86 orang	344.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB, Kader MP yang dibina	86 orang	344.000.000
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	86 orang	128.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	86 orang	128.000.000
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	216.000.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	216.000.000
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	127.940.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	127.940.000
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	7.184.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	7.184.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesiapan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesiapan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2161 Orang	103.659.000	Peningkatan Kesiapan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesiapan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2161 Orang	103.659.000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	17.097.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Temasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	17.097.000
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesiapan Ber-KB		Jumlah kgiatan edukasi/soialisasi/kelasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasayarakatan	1 kegiatan	104.115.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesiapan Ber-KB		Jumlah kgiatan edukasi/soialisasi/kelasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasayarakatan	1 kegiatan	104.115.000
2.14.03.2.04.0001	Pengabdian Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesiapan Ber-KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendukung Pengabdian Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesiapan Ber-KB	3 Organisasi	14.515.000	Pengabdian Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesiapan Ber-KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendukung Pengabdian Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesiapan Ber-KB	3 Organisasi	14.515.000
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rasi Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	13.300.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	13.300.000
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mempunyai Petakanaan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	76.300.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mempunyai Petakanaan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	76.300.000
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persestase Keluarga yang mengikuti kelompok kgiatan ketahanan Keluarga	62,25 %	#####	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persestase Keluarga yang mengikuti kelompok kgiatan ketahanan Keluarga	62,25 %	#####
			Indeks Lansia Berdaya	59,4 Angka				Indeks Lansia Berdaya	59,4 Angka	
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	88,96 Angka				Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	88,96 Angka	
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	64 Kelompok	775.558.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	64 Kelompok	775.558.000
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keluargajasaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keluargajasaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	74.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keluargajasaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keluargajasaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	74.000.000
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Ketahanan Sejahtera (PPKS)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Isaporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Ketahanan Sejahtera (PPKS)	12 Laporan	9.598.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Ketahanan Sejahtera (PPKS)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Isaporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Ketahanan Sejahtera (PPKS)	12 Laporan	9.598.000
2.14.04.2.01.0018	Pengabdian Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Pendirian dan Pengembangan Keluarga Aksesoris (UPKA))	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Pendirian dan Pengembangan Keluarga Aksesoris (UPKA))	10 Unit	130.000.000	Pengabdian Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Pendirian dan Pengembangan Keluarga Aksesoris (UPKA))	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Pendirian dan Pengembangan Keluarga Aksesoris (UPKA))	10 Unit	130.000.000
2.14.04.2.01.0024	Peningkatan Tingkat Kepatuhan dan Kesejahteraan Keluarga bagaimana Kesiapan Ber-Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pelatihan dan Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Pendirian dan Pengembangan Keluarga Aksesoris (UPKA)) yang mendapat bantuan operasional Kesiapan Ber-Keluarga	223 Orang	561.960.000	Peningkatan Tingkat Kepatuhan dan Kesejahteraan Keluarga bagaimana Kesiapan Ber-Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Pendirian dan Pengembangan Keluarga Aksesoris (UPKA)) yang mendapat bantuan operasional Kesiapan Ber-Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pelatihan dan Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Pendirian dan Pengembangan Keluarga Aksesoris (UPKA)) yang mendapat bantuan operasional Kesiapan Ber-Keluarga	223 Orang	561.960.000
2.14.04.2.02.	Peningkatan Tingkat Kepatuhan dan Kesejahteraan Keluarga bagaimana Kesiapan Ber-Keluarga		Jumlah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasayarakatan	1 kegiatan	459.246.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasayarakatan	1 kegiatan	459.246.000
			Percentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen				Percentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Pembinaan Ekonomi Keluarga(PEKK))	23 organisasi	185.666.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Pembinaan Ekonomi Keluarga(PEKK))	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Pembinaan Ekonomi Keluarga(PEKK))	23 organisasi	185.666.000
2.14.04.2.02.0004	Peningkatan Tingkat Kepatuhan dan Kesejahteraan Keluarga bagaimana Kesiapan Ber-Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Tingkat Kepatuhan dan Kesejahteraan Keluarga bagaimana Kesiapan Ber-Keluarga	1 Laporan	9.590.000	Peningkatan Tingkat Kepatuhan dan Kesejahteraan Keluarga bagaimana Kesiapan Ber-Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Tingkat Kepatuhan dan Kesejahteraan Keluarga bagaimana Kesiapan Ber-Keluarga	1 Laporan	9.590.000
2.14.04.2.02.0005	Peningkatan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peningkatan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan	120.000.000	Peningkatan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peningkatan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan	120.000.000

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	144.000.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	144.000.000

2.5 Penelahaan Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pada Musrenbang Perubahan RKPD tidak adanya usulan musrembang yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dan terdapat 12 Pokok Pikiran Anggota Dewan DPRD Kota Padang Panjang yang telah di akomodir pada tahun 2025.Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6
Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL					
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan					
1		JL. SYECH M JAMIL RT 5 KELURAHAN KOTO PANJANG, Kota Padang Panjang	Percentase PPKS yang tertangani	1 Orang	15.000.000	
2		KAMPUNG TELENG NO 35 RT 12 KEL KAMPUNG MANGGIS, Kota Padang Panjang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1 Orang	17.450.000	
3		jl. anas karim sungai andok, RT.006, kel, kamoung manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	7.499.995	
4		Jl. H. Sumanik RT.1 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
5		Bukit kandung RT.9, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
6		Solok batuang RT.9 kel. Sigando, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.250.000	
7		Jl. Muchtar Luthfi No.25 RT.11 Kel. Ngalau, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
8		Jl. Syech Ibrahim Musa RT.2 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
9		Bukit Kandung RT.9 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
10		tabek gadang RT.8 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
11		Jl. Syech Ibrahim Musa No.31 RT.2 Kel. Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Percentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif			
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina			
12	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	40.000.000	
	JUMLAH				216.199.995	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2030 berpedoman pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030. Kebijakan nasional tersebut menempatkan pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam mewujudkan *Indonesia Emas 2045*. Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa agenda nasional yang menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya bidang sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yaitu:

1. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial Nasional

Kebijakan nasional menekankan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Hal ini meliputi pemutakhiran data kemiskinan dan kerentanan sosial melalui PPKS, peningkatan efektivitas bantuan sosial, serta perluasan akses layanan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan korban kekerasan. Bagi Kota Padang Panjang, kebijakan ini menjadi landasan dalam meningkatkan cakupan dan kualitas layanan sosial, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.

2. Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Dalam RPJMN 2025–2030, kebijakan pengendalian penduduk diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, serta mewujudkan keluarga yang

berkualitas. Pemerintah nasional mendorong pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), peningkatan ketahanan keluarga, dan penanganan keluarga berisiko stunting. Kota Padang Panjang mengadaptasi kebijakan ini melalui penguatan pelayanan KB, pembinaan pasangan usia subur, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan keluarga yang berketahtaan, bahagia, dan produktif.

3. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
emerintah pusat menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan PUG, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Kebijakan nasional tersebut menjadi acuan bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperluas partisipasi perempuan di bidang publik, meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, serta memperkuat mekanisme layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender.
4. Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak
RPJMN menekankan pentingnya pembangunan anak sebagai investasi masa depan bangsa melalui penguatan sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Kota Padang Panjang mengadopsi kebijakan ini dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas layanan ramah anak, serta memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksplorasi.
5. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Kebijakan nasional juga menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,menindaklanjuti kebijakan ini melalui peningkatan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), penguatan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis

elektronik, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik yang responsif gender dan inklusif

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menegaskan komitmennya untuk:

- Meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat ketahanan keluarga,
- Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
- Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, serta
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

Dengan keselarasan terhadap kebijakan nasional tersebut, arah pembangunan sosial diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2025 - 2030.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPJMD 2025 - 2030, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2026. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 - 2030.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Rencana Startegis tahun 2025 – 2030 yang ditetapkan yaitu dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Perubahan Rencana Kerja
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran	Satuan	Renstra 2025	P-Renja 2025
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70	70	
	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,56	66,56	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,25	98,25	
	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	2714	2714	
	Angka PPKS	Angka	3,34	3,34	
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	70,00	70,00
	Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	97,5	97,5
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	66,33	66,33
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama	Pratama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran	Satuan	Renstra 2025	P-Renja 2025
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya
Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,39	2,39
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,10	6,10
	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	75	75

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Rencana Startegis tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan yaitu : Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap Masyarakat, dengan indicator dan target perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) , dengan target pada angka 70
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) , dengan target pada angka 66,56
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) , dengan target pada angka 98,25
4. Jumlah penduduk miskin, dengan target 2714 orang ribu
5. Angka PPKS, dengan target pada angka 70

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 - 2029, untuk mendukung capaian tujuan Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indicator Nilai AKIP Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan target pada angka 70 ;

2. Meningkatnya Layanan sosial bagi PPKS, dengan indicator Persentase PPKS yang tertangani dan target 97,5 % dan indicator Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target pada indeks 66,33 ;
3. Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender, dengan indicator Predikat Penganugran Parahita Ekapraya (PPE) dan target pada indeks Pratama;
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak , dengan indicator Tingkat Capaian Kota Layak Anak dan target pada prediket Nindya;
5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, dengan indicator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) target pada angka 2,39 dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) target pada angka 6,1;
6. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting, dengan indicator Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan dan target 75 %;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, perubahan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi internal, ditemukan bahwa beberapa tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan isu sosial. Selain itu, adanya kebijakan nasional terkait penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, disabilitas, lansia, dan perlindungan anak, menuntut Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Dinas Sosial disempurnakan agar lebih terukur, relevan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Perubahan tujuan difokuskan pada orientasi peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, bukan hanya penyediaan layanan dasar.

Dalam rangka memperkuat arah pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, dan keluarga berencana, dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi capaian kinerja sebelumnya, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, serta kebutuhan untuk menghasilkan ukuran kinerja yang lebih relevan, terukur, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Penyesuaian Sasaran Layanan Sosial bagi PPKS

Sebelumnya, sasaran “*Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan*” difokuskan pada jumlah penerima layanan. Pada perubahan sasaran, orientasi diperluas menjadi “*Meningkatnya layanan sosial* yang menekankan kualitas dan keberlanjutan layanan. Indikator tetap menggunakan persentase PPKS tertangani, namun target ditingkatkan dari 97% menjadi 97,5%, mencerminkan komitmen peningkatan efektivitas layanan.

Penyesuaian Sasaran Pemenuhan Hak Anak

Sasaran “*Meningkatkan pemenuhan hak anak*” mengalami penajaman indikator. Awalnya indikator menggunakan *Persentase indikator KLA yang terpenuhi*, kini disempurnakan menggunakan indikator *Tingkat Capaian Kota Layak Anak* yang mengacu pada standar nasional. Target meningkat dari pemenuhan indikator menjadi pencapaian KLA kategori NINDYA, sehingga lebih sesuai dengan arah kebijakan perlindungan anak.

Penajaman Sasaran Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Sebelumnya, sasaran diberi judul “*Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak*” dengan indikator *Predikat APE*. Setelah perubahan, sasaran diperjelas menjadi “*Meningkatnya upaya pembangunan dan kesetaraan gender*”, yang menekankan aspek pengarusutamaan gender. Indikator disesuaikan menjadi *Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)* dengan target Pratama, sesuai regulasi terbaru tentang evaluasi PUG.

Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), indikator kinerja *Anugerah Parahita Ekapraya (APE)* mengalami perubahan nomenklatur menjadi *Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)*. Perubahan ini dilakukan karena

pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan penyesuaian terminologi dan tata penilaian untuk memperkuat akurasi pengukuran capaian kinerja PUG di daerah.

Indikator APE yang sebelumnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan kini diperbarui menjadi PPE untuk mencerminkan cakupan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek pemberdayaan perempuan, tetapi juga menyangkut integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Pergeseran istilah ini sekaligus menekankan bahwa penilaian tidak sekadar fokus pada penghargaan, tetapi pada peningkatan kualitas implementasi PUG secara nyata dan berkelanjutan.

Perubahan indikator ini bertujuan untuk:

- 1) Menyeragamkan indikator daerah dengan standar nasional yang berlaku saat ini.
- 2) Meningkatkan ketepatan pengukuran kinerja, terutama terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- 3) Memperkuat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena PPE mencakup aspek kelembagaan, pelaksanaan, serta keberlanjutan PUG.
- 4) Memberikan gambaran capaian yang lebih jelas terhadap upaya kesetaraan gender di daerah.

Perubahan Sasaran Pelayanan Kependudukan dan KB

Sasaran “*Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana*” tetap dipertahankan namun indikator kinerja diperbarui agar sesuai standar indikator nasional (BKKBN). Indikator sebelumnya menggunakan *Rata-rata jumlah anak per keluarga*, kini diganti menjadi:

- 1) Angka Kelahiran Total (TFR) dengan target 2,39
- 2) Angka Kelahiran Remaja 15–19 tahun (ASFR) dengan target 6,1

Perubahan ini memperkuat relevansi pengukuran kinerja sesuai indikator demografi yang diakui secara nasional.

TFR adalah Angka Kelahiran Total, yaitu rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15–49 tahun) apabila pola fertilitas pada tahun tertentu tetap sama. ASFR adalah Angka

Kelahiran Menurut Kelompok Umur, yaitu jumlah kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu dalam usia reproduksi (misal 15–19 tahun, 20–24 tahun, dst.).

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendukung pembangunan serta untuk memenuhi target SPM dan IKK pada Tahun 2025, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Program dan Kegiatan perubahan sesuai dengan urusan wajib yang diemban, sesuai dengan tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2
Rekap Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
1	Jumlah Program	13	13	13
2	Jumlah Kegiatan	31	31	31
3	Jumlah Sub Kegiatan	59	75	70

Jumlah Program di RKPD Perubahan Tahun 2025 sebanyak 13 prorgam sesuai dengan jumlah pada APBD serta RKPD Perubahan Tahun 2025. Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan 2025 sebanyak 31 kegiatan sedangkan pada

APBD dan RKPD Perubahan 2025 ada 31 kegiatan. Begitu juga dengan jumlah sub kegiatan pada RKPD 2025 sebanyak 59 sub kegiatan pada APBD berkurang menjadi 75 sub kegiatan dan pada RKPD Perubahan 2025 berkurang lagi menjadi 70 sub kegiatan. Terjadi pengurangan jumlah pada kegiatan dan sub kegiatan, hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang di akomodir oleh dana DAK dan juga dikarenakan efisiensi anggaran atau refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dihilangkan dari rencana RKPD awal tahun 2025.

Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosisnya yang terdapat pada Renja sipd-ri.kemedagri.go.id dapat dilihat pada **tabel di bawah ini** :

Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang
Panjang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sosaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INAS SOSIAL PENGENDALIAN BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							#####	#####	#####							9.392.184.781,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.325.682.090	9.774.726.188	#####							6.795.533.781,00	
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							9.325.682.090	9.774.726.188	#####							6.795.533.781,00	
56	1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pemenuhan urusan administrasi keuangan yang diberikan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %		100 %	100 %	100 %	6.568.934.322	6.464.715.625	#####							5.166.969.762,00	
	1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	5.179.297.765	5.115.796.725	#####				-			4.055.930.882,00	Dinosos P2KBP3A
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3024 Orang/bulan		504 Orang/bulan	560 Orang/bulan	504 Orang/bulan	5.179.297.765	5.115.796.725	4.675.865.490	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif	-	4.055.930.882,00	Dinosos P2KBP3A	
	1.06.01.2.06.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	336.075.545	287.592.235	154.313.392			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif	-	327.916.200,00	Dinosos P2KBP3A	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29 Paket		5 Paket	4 Paket	4 Paket	5.391.700	5.391.700	5.391.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif	-	5.391.700,00	Dinosos P2KBP3A	
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		7 Paket	7 Paket	7 Paket	73.159.345	73.132.145	11.520.170	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif	-	65.000.000,00	Dinosos P2KBP3A	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	24.499.500	20.013.390	42.645.522	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif	-	24.499.500,00	Dinosos P2KBP3A	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	233.025.000	189.055.000	94.756.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif	-	23.025.000,00	Dinosos P2KBP3A	
	1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	0 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	110.000.000	38.742.100	22.184.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif	-	60.000.000,00	Dinosos P2KBP3A	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		13 Unit	5 Unit	2 Unit	110.000.000	38.742.100	22.184.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		50.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyebarluasan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	468.288.000	711.000.000	688.164.840			-				522.181.680,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	53.893.680	47.893.165	43.244.840	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		53.893.680,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	468.288.000	711.000.000	644.920.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		468.288.000,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 persen	421.379.332	263.691.400	251.829.950			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		210.941.000,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit		21 Unit	21 Unit	21 Unit	256.379.332	125.685.600	121.830.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		111.525.000,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepaslang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	202 Unit		27 Unit	27 Unit	27 Unit	75.000.000	77.205.800	59.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		35.516.000,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		55 Unit	55 Unit	55 Unit	50.000.000	20.800.000	20.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		23.900.000,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	49.999.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
57	1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %		100 %	1.289.684.600	1.210.709.100	*****							378.319.700,00		
			Percentase Lembaran di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %		100 %												
	1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kecamatan/Kota	Percentase lembaga sosial yang aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.299.684.600	1.210.700.100	*****			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		378.319.700,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan/Kota	Jumlah Organisasi/Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga		92 Lembaga	92 Orang	92 Lembaga	297.222.800	315.404.300	279.110.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		267.222.800,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	2 Orang	8.650.000	5.700.000	2.850.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		8.640.000,00	Dinsos P2KB3A		
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	900.000.000	791.207.500	683.206.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi		8.640.000,00	Dinsos P2KB3A		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakirana Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.06.02.2.03.005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengjuatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Sertifikat		3 Sertifikat	5 Sertifikat	3 Sertifikat	93.811.800	98.388.300	90.543.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		93.816.900,00	Dinsos P2KB3A				
58	1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %	1.049.911.249	1.725.910.794	*****							873.711.400,00			
			Percentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %													
			Percentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %													
			Percentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %													
			Percentase Pemerluru Pelayanan Kesehatan yang Dapat Mengaksesnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %													
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	Jumlah paket kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar pantai	3057 Paket		750 Paket	750 Paket	750 Paket	676.199.545	646.099.545	660.942.450			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		500.000.000,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	570 Orang		459 Orang	459 Orang	163 Orang	376.199.545	376.199.545	488.018.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		200.000.000,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Memerlukan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang		459 Orang	75 Orang	33 Orang	150.000.000	150.000.000	98.365.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		150.000.000,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantuan Untuk Diri Porang Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang		22 Orang	22 Orang	35 Orang	80.000.000	55.900.000	35.186.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		80.000.000,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000	44.000.000	28.974.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		50.000.000,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Orang		50 Orang	20 Orang	50 Orang	20.000.000	20.000.000	10.399.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		20.000.000,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MKSS) yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantai Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantai	2792 Orang		2792 Orang	2710 orang	2710 Orang	373.711.704	433.711.704	354.358.134			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		373.711.400,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang		75 Orang	75 Orang	75 Orang	75.000.000	55.000.000	47.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		75.000.000,00	Dinsos P2KB3A				
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Memerlukan pokok dan kelengkapan bairnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	310 orang		75 orang	75 orang	75 orang	75.000.000	55.000.000	44.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		75.000.000,00	Dinsos P2KB3A				

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif	18	19	20	21	
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantuan Kehilangan Peraga sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		5 Orang	5 Orang	5 Orang	10.000.000	10.000.000	7.500.000						10.000.000,00	Dinsos P2KBPA		
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1060 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	120.000.000	220.000.000	166.756.330	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			120.000.000,00	Dinsos P2KBPA	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kementrian dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hesi Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kementrian dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	68 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	93.711.704	93.711.704	88.801.804	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			93.711.400,00	Dinsos P2KBPA	
59	1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %		100 %	100 %	100 %	228.648.800	221.614.050	75.977.750							228.029.800,00		
			Percentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %		100 %	100 %	100 %												
			Percentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	7.55 %		7 %	7.3 %	7.3 %												
			Percentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Penetapan Data Fakir Miskin	100 %		100 %	100 %													
			Percentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Dapat Perlindungan Sosial yang Tergradiasi dari Kemiskinan	7.55 %		7 %	7.3 %													
	1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang miskin yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan		17 layanan	17 layanan	17 layanan	228.648.600	221.614.050	75.977.750			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			228.029.600,00	Dinsos P2KBPA	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	11714 Orang		2119 Orang	2119 Orang	2119 Orang	79.939.000	79.895.000	12.509.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			79.320.000,00	Dinsos P2KBPA	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Sesuai Standart Kewenangan Kabupaten/Kota	6355 Keluarga		1271 Keluarga	1271 Keluarga	1271 Keluarga	133.709.600	133.709.600	63.467.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			133.709.600,00	Dinsos P2KBPA	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0 Orang	15.000.000	8.009.450	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Dinsos P2KBPA	
60	1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Percentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Sosial Setelah Tenggat Durasi Bencana	100 %		100 %	100 %	100 %	153.503.319	99.999.719	90.912.037								123.503.319,00	
			Percentase Masyarakat di Daerah Terdampak yang Meningkat Kesadariannya	100 %		100 %	100 %	100 %												
			Percentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemuliharaan Sosial	100 %		100 %	100 %	100 %												
	1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Percentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	80.000.000	26.500.000	14.543.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			80.000.000,00	Dinsos P2KBPA	
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sandang dan Dukungan yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang		300 Orang	300 Orang	300 Orang	30.000.000	20.000.000	13.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Dinsos P2KBPA	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	20.000.000	6.500.000	1.443.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		20.000.000,00	Dinsos P2KBPA				
	1.06.06.2.02.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang diberi	30 Orang	30 Orang	30 orang	30 Orang	103.503.319	73.499.719	76.369.037			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		73.503.319,00	Dinsos P2KBPA				
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	103.503.319	73.499.719	76.369.037	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		73.503.319,00	Dinsos P2KBPA				
61	1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Percentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	100 %	25.000.000	61.785.900	114.617.500							25.000.000,00			
	1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	98 makam		98 makam	98 makam	98 makam	25.000.000	61.785.900	114.617.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		25.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	588 Makam		98 Makam	98 Makam	98 Makam	25.000.000	51.785.900	114.617.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		25.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								745.869.000	1.124.318.200	819.009.181							2.096.651.000,00			
	2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREMPUAN DAN KEPEREMPUANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							745.869.000	1.124.318.200	819.009.181							711.869.000,00			
62	2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15,5 Persen		15,38 Persen	15,4 Persen	15,4 Persen	263.580.000	253.580.000	283.935.440								219.500.000,00		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,47 Persen		68,33 Persen	66,37 Persen	66,37 Persen													
	2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengurusan GAP dan Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terlengkap	23 OPD		23 OPD	23 OPD	23 OPD	74.000.000	74.000.000	33.368.100			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAS	23 OPD		23 OPD	23 OPD	23 OPD													
	2.08.02.2.01.0006	Sosialisasi ketujuh penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Jumlah sosialisasi ketujuh penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang		23 Orang	23 Orang	23 Orang	74.000.000	74.000.000	33.368.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.02.2.02.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Pendidikan, Kultur, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase perempuan partai politik yang mendapat penghargaan dan mendapat penghargaan keterlibatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta pengembangan kewenangan	0 Persen		20 Persen	50 Persen	0 Persen	30.000.000	30.000.000	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Ketujuh dan Pendampingan Perempuan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah orang yang mendapat penghargaan dan didampingi oleh media yg diadvoiki dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	130 organisasi		26 organisasi	26 Organisasi	0 Organisasi	30.000.000	30.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Desa/KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.02.2.02.0003	Pengusutan dan Pengembangan Lembar Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	26 organisasi		26 organisasi	26 organisasi	26 organisasi	149.580.000	149.580.000	230.567.340			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Peduli dan Inklusif Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		149.580.000,00	Dinsos P2KBPA			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakirana Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase lembaga penyedia layanan korban kekerasan dan sosialisasi tentang peringangan kasus	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen															
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	Untuk Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota yang Tersebar	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	149.580.000	149.580.000	230.567.340	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		149.580.000,00	Dinsos P2KBPA			
63	2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan (corban)	100 %		100 %	100 %	100 %	149.532.000	202.390.300	147.632.000								149.532.000,00		
	2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	60 Laporan		12 Laporan	8 Lembara	12 Lembara	30.000.000	68.345.300	50.000.000				-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBPA		
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Perbaikan Kegiatan dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Perbaikan Kegiatan dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen		3 dokumen	6 Lembara	3 dokumen	30.000.000	68.345.300	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjut bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/taraf lanjut yang terlibat dalam mekanisme rujukan	3 Lembara		3 Lembara	3 Lembara	3 Lembara	104.502.000	95.000.000	68.587.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		104.502.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjut bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	3 layanan		3 layanan	12 Layanan	3 layanan	104.502.000	95.000.000	68.587.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		104.502.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.03.2.03.	Pengujian dan Pengembangan Perbaikan Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum yang diterbitkan	8 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.030.000	39.045.000	29.045.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		15.030.00.00	Dinsos P2KBPA			
		Pengujian dan Pengembangan Perbaikan Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang peringangan kasus	500 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen													
			Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	50 layanan		10 layanan	10 layanan	10 layanan													
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Perlindungan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusa Lembaga Perlindungan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	18 lembara		3 lembara	-	3 lembara	-	29.045.000	29.045.000	Kota Padang Panjang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DAK Non Finansial, Dana Pelayanan Publik, Pengembangan Perbaikan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.03.2.03.0004	Pengukuran Jejaring antar Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Jejaring antar Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	15.030.000	10.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		15.030.00.00	Dinsos P2KBPA			
64	2.08.06.	PROGRAM PEMERUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64,24 Angka		64,05 Angka	64,05 Angka	64,05 Angka	120.620.000	270.375.600	86.291.041								120.620.00.00		
	2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Duta Usaha Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	4 Lembara		4 Lembara	4 Lembara		43.855.000	135.587.400	26.310.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		43.855.00.00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemerintah Hak Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemerintah Hak Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	43.855.000	135.587.400	26.310.400	Kota Padang Panjang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		43.855.00.00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.06.2.02.	Lengkapean dan Peningkatan Lembaga Perlindungan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	- Persentase forum anak aktif	-			70 Persen	70 Persen	76.765.000	134.788.200	59.980.641			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif		76.765.00.00	Dinsos P2KBPA			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakirana Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)																		
			Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak																		
2.08.06.2.02.0004	Pengabdian Jalinan antar Lembaga Pemerintahan dan Peringkat Tingkat Daerah Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Perkembangan Peningkatan Layanan Peringkat Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	76.765.000	134.788.200	59.980.641	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		76.765.000,00	Dinsos P2KBPA				
65	2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang diperlakukan Pada Lingkungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (IPKA)	100 %		100 %	100 %	100 %	222.137.000	397.972.300	321.150.700							222.137.000,00			
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	85,98 Angka		85,74 Angka	85,8 Angka	85,8 Angka													
	2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	persen		100 persen	100 persen	100 persen	62.137.000	147.857.300	103.224.800			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		62.137.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.07.2.01.0004	Advocacy dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan penegahan KTA	Jumlah SDM yang memimpin advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan penegahan KTA	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10 Orang	22.137.000	61.500.000	57.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		22.137.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/kota	0 Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000	86.357.300	46.224.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	160.000.000	210.140.000	177.950.900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		160.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang		Orang	12 Orang	12 Orang	40.000.000	25.000.000	7.810.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43 orang		43 orang	12 Layanan	43 orang	120.000.000	185.140.000	170.140.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		120.000.000,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.07.2.03.	Pengustian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi	10 orang		43 orang	-	10 orang		-	39.975.000	39.975.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBPA			
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penganggaran bagi AMPK tingkat Gresik kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlibat dan mendapat sertifikasi Perlindungan dan Penganggaran AMPK	10 orang		-	10 orang	-	39.975.000	39.975.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Fisik-Penganggaran Perempuan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifl dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBPA			
	2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DALAM RUMAH DAN KELUARGA BERENCANA							1.397.000.000	2.349.228.611	*****							1.864.782.000,00			
66	2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	2,34 Angka		2,51 Angka	2,39 Angka	2,39 Angka	63.000.000	85.501.746	73.344.600								30.000.000,00		
			Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	6 Angka		6,2 Angka	6,1 Angka	6,1 Angka													

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	0,88 %		0,89 %	0,89 %	0,89 %												
2.14.02.2.01.	Peningkatan dan Sintesisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	23.000.000	12.302.050	7.358.800			-		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jular Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jular Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Kegiatan		0 Kegiatan	25 Kegiatan	0 Kegiatan	23.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jular Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jular Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	12.302.050	7.358.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.02.2.02.	Peningkatan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah duku yang dikembangkan	16 unit		16 Unit	16 unit	16 Unit	30.000.000	73.199.696	65.985.800			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	30.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi PPKB di Desa dan Kelurahan/Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Desa dan Kelurahan/Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	96 Unit		16 Unit	16 Unit	16 Unit	30.000.000	29.999.696	22.785.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	30.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
67	2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Aktivitas Kegiatan Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	64,5 %		62 %		62,25 %	248.880.000	1.107.417.465	*****								356.064.00,00	
			Percentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Umet Need)	11,5 %		14 %		13,7 %												
			Ratio akseptor KB	74,69 %		74,41 %		74,45 %												
			Progresi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	67 %		65,73 %		66 %												
			Percentase Kampung Keluarga Berkultas Mandiri	100 %		100 %		100 %												
	2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Kesehatan dan KB Pengembangan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	4904 orang		4704 orang	2300 orang	4734 orang	55.000.000	477.997.465	428.975.465			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	155.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan		Laporan	-	12 Laporan	-	60.000.000	60.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	60.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keharmonisan Keluarga Berencana)	60 Laporan		12 Laporan	-	0 Laporan	-	97.997.465	97.997.465	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifil dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KB3A		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakirana Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakirana Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Pengembangan Kinerja melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Pengembangan Bangga Kencana (Pembangunan Kelarga Kependidikan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	12 Laporan	0 Laporan	-	12 Laporan	-	40.000.000	40.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Kelarga Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	0 Dokumen	-	4 Dokumen	-	125.000.000	125.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kestrib Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Kelarga Kependidikan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kestrib Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Kelarga Kependidikan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	15.000.000	115.000.000	105.978.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		15.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	86 orang	86 orang	99 orang	86 orang	137.880.000	355.880.000	344.000.000	-	-	-	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif	-	137.880.000,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	86 orang	86 orang	-	86 orang	-	128.000.000	128.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Kelarga Kependidikan, dan Keluarga Berencana) oleh Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	1 organisasi	40 Organisasi	1 organisasi	137.880.000	227.880.000	216.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		137.880.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Polya dan Diklat di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Polya dan Diklat di Daerah Kabupaten/Terminus Jaringan dan Jejaringnya	60 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	127.940.000	127.940.000	-	-	-	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif	-	7.164.000,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Kabupaten/Kota Terminus Jaringan dan Jejaringnya	60 laporan	12 laporan	-	12 laporan	-	7.184.000	7.184.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		7.184.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertean Penggunaan Melide Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesertean Penggunaan Melide Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2481 Orang	0 Orang	-	2161 Orang	-	103.659.000	103.659.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelajaran Kelangsungan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembenaran Kesertean Ber-KB	Jumlah Laporan Hasil Pemberian Pelajaran Kelangsungan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembenaran Kesertean Ber-KB	12 Laporan	0 Laporan	-	12 Laporan	-	17.097.000	17.097.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.03.004	Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembenaran Kesertean Ber-KB	Jumlah Anggota edukasi/polisialisasi KB yang dilaksanakan oleh bersama organisasi kemasayarakatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	56.000.000	145.600.000	104.115.000	-	-	-	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif	-	56.000.000,00	Dinsos P2KB3A		
	2.14.03.2.04.0001	Pengutusan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembenaran Kesertean Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pengutusan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembenaran Kesertean Ber-KB	3 Organisasi	0 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	56.000.000	56.000.000	14.515.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adipati dan Kolaboratif		56.000.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	0 Dokumen	-	12 Dokumen	-	13.300.000	13.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran penerbitan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi		0,00	Dinsos P2KB3A			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakirana Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Membangun Keluarga, Kependidikan, dan Kehuaga Berencana)	16 Kampung	16 Kampung	16 Kampung	16 Kampung	-	76.300.000	76.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KB3A					
68	2.14.04.	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Percentase Keluarga yang memiliki kelompok kegiatan Keluarga Keluarga	64,5 %		62 %		62,25 %	1.095.129.000	1.156.309.400	*****							1.498.718.000,00			
			Indeks Lansia Berdaya	61,4 Angka		NA Angka		59,4 Angka													
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	81,86 Angka		86,86 Angka		86,86 Angka													
	2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok keterhanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	64 Kelompok		64 Kelompok		64 Kelompok	582.560.000	751.558.000	775.558.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		692.158.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesoris (UPPKA) yang terdesak)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga (Merjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keharuan dan Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	74.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sepatuwa (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Keluarga Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sepatuwa (PPKS)	12 Laporan		Laporan	-	12 Laporan	-	9.598.000	9.598.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		9.598.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesoris (UPPKA) yang terdesak)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesoris (UPPKA) yang mendapat bantuan operasional kegiatan)	10 Unit		Unit	-	10 Unit	-	130.000.000	130.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		130.000.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.01.0024	Peningkatan Bawa Operasional bagi Pengelolaan dan Pengembangan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKA)) yang mendapat bantuan operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesoris (UPPKA) yang mendapat bantuan operasional kegiatan)	1338 Orang		223 Orang	223 Orang	223 Orang	522.560.000	561.960.000	561.960.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		522.560.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Guru dan Kependidikan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kgiatan pembinaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasayarakatan	5 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	542.560.000	424.751.400	459.246.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		806.560.000,00	Dinsos P2KB3A			
			Pengertian OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen		54 persen	54 persen	54 persen													
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA))	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA))	23 organisasi		23 organisasi	23 Organisasi	23 organisasi	522.560.000	140.751.400	185.666.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		522.560.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Keterhanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	9.580.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		20.000.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.02.0005	Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kehilangan, Badut/Balita)	Cakupan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kehilangan, Badut/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	-	120.000.000	120.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		120.000.000,00	Dinsos P2KB3A			
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kehilangan, Badut/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kehilangan, Badut/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	-	144.000.000	144.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adapifit dan Kolaboratif		144.000.000,00	Dinsos P2KB3A			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKP2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
												Seropa Kecamatan			Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif						

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan pencajabaran dari Rencana Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini mendasarkan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini sudah melalui tahap-tahap yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 ini menjadi tanggungjawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka menunjang pencapaian pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaraktkan pentingnya koordinasi dan sinkronosis antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas

kota dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat inikatif seingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi regulasi serta ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah tahun anggaran bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan perubahan Renja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Perubahan RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2025;
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan monitoring dan evalausai pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2025 yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Dengan adanya Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis , target program dan kegiatan dapat lebih focus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Padang Panjang, 30 Juni 2025

**Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang**



Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si
Pembina Utama Muda, NIP. 19690120 198902 1 001